

Report title: BAB III PEMBAHASAN  
Report ID: c7a2939f6d8b03823657  
Date: 09/23/2019  
Score: 8%

#1

71% similar

"Sejarah Tentang Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. 1"

[https://www.academia.edu/21741944/PERAN\\_STRATEGIS\\_PENGADILAN\\_AGA\\_MA\\_DALAM\\_PENYELESAIAN\\_SENGKETA\\_EKONOMI\\_SYARIAH](https://www.academia.edu/21741944/PERAN_STRATEGIS_PENGADILAN_AGA_MA_DALAM_PENYELESAIAN_SENGKETA_EKONOMI_SYARIAH)

...gn UpLog InSign Upmore Job

BoardAboutPressBlogPeoplePapersTermsPrivacyCopyright We're Hiring!

Help Centerless pdf**PERAN STRATEGIS PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH**Jurnal al-ihkamAndi

FarianaJurnal al-ihkamAndi FarianaDownload with GoogleDownload with Facebook...

#2

99% similar

"Dengan bahasa sosiologis peradilan agama telah lama hidup sebagai tatanan sosial ummat Islam"

<https://ketipp.blogspot.com/2011/04/mahkamah-syariahabdulcom.html>

...ri masa kemas merupakan kebutuhan nyata yang menyatu sebagai tatanan kehidupan ummat islam. **dengan bahasa sosiologis, peradilan agama telah lama hidup sebagai tatanan social ummat islam.** dengan bahasa budaya, dapat di sebutkan, kehadiran peradilan agama telah menjadi salah satu...

#3

69% similar

"Untuk Yurisdiksi ekonomi syariah, dirinci menjadi sebelas macam wewenang yang meliputi perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah"

<http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/download/186/173>

...2014 16 Kemudian terkait ekonomi syariah, penjelasan Pasal 49 huruf i menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan **ekonomi syariah? adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah**. Pasal 49 menyebutkan bahwa: 1. Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkar...

#4

75% similar

"Kedudukan dan Fungsi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 1"

<https://www.pta-gorontalo.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tupoksi>

...Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah **diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006** yaitu: Peradilan Agama merupakan salah satu pela...

#5

70% similar

"Ratio legis lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang kaya akan keberagaman, baik budaya, bahasa, bahkan agama"

<https://www.pa-batulicin.go.id/134-artikel/295-dinamika-dan-prospek-perbankan-syariah-di-indonesia-oleh-syaiful-annas.html>

...diinginkan sesuai dengan matrik menu webaite menurut SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011. Site Map Update **Putusan PA.Batulicin Feed not found. Latar Belakang Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang kaya akan keberagaman, baik dalam budaya, bahasa, bahkan agama.** Berdasarkan kekayaan dalam keberagaman tersebut sehingga masyarakat Indonesia layak disebut sebagai...

#6

94% similar

"Berdasarkan kekayaan dalam keberagaman tersebut sehingga masyarakat Indonesia layak sebagai masyarakat majemuk"

<https://www.pa-batulicin.go.id/134-artikel/295-dinamika-dan-prospek-perbankan-syariah-di-indonesia-oleh-syaiful-annas.html>

...at Indonesia adalah masyarakat yang kaya akan keberagaman, baik dalam budaya, bahasa, bahkan agama. **Berdasarkan kekayaan dalam keberagaman tersebut sehingga masyarakat Indonesia layak disebut sebagai masyarakat majemuk.** Dalam kehidupan sosial, masyarakat tersebut tentunya tidak terlepas dengan adanya interaksi antar in...

#7

95% similar

"Dalam kehidupan sosial, masyarakat tersebut tentunya tidak terlepas dengan interaksi antar individu sebagai proses sosialisasi baik dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang perekonomian"

<https://www.pa-batulicin.go.id/134-artikel/295-dinamika-dan-prospek-perbankan-syariah-di-indonesia-oleh-syaiful-annas.html>

...dalam keberagaman tersebut sehingga masyarakat Indonesia layak disebut sebagai masyarakat majemuk. **Dalam kehidupan sosial, masyarakat tersebut tentunya tidak terlepas dengan adanya interaksi antar individu sebagai proses sosialisasi baik dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang perkeonomian.** Dalam agama Islam sendiri, keberadaan agama dan ekonomi merupakan salah satu bagian yang tidak terl...

#8

100% similar (exact match)

"Dalam agama Islam sendiri, keberadaan agama dan ekonomi merupakan salah satu bagian yang tidak terlepas, karena islam tidak diartikan sebagai agama an sich tapi juga sebuah pandangan atau cara hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia, maka tidak ada satu pun aspek kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran Islam, termasuk aspek ekonomi"

<https://www.pa-batulicin.go.id/134-artikel/295-dinamika-dan-prospek-perbankan-syariah-di-indonesia-oleh-syaiful-annas.html>

...r individu sebagai proses sosialisasi baik dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang perkeonomian. **Dalam agama Islam sendiri, keberadaan agama dan ekonomi merupakan salah satu bagian yang tidak terlepas, karena Islam tidak diartikan sebagai agama an sich tapi juga sebuah pandangan atau cara hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia, maka tidak ada satu pun aspek kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran Islam, termasuk aspek ekonomi.**[1] Ajaran Islam tidak hanya memberikan panduan ritual, namun juga dalam berkehidupan bermasyarakat...

#9

68% similar

"lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

Syariah, juga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tidak terlepas dari peran para tokoh penggerak ekonomi syariah"

<https://pdfs.semanticscholar.org/cc9a/d3f435ac374a0292dfb085fbad9d3d413753.pdf>

...omor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas **Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).** Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Internet Kholis, Nur. Potret Politik...

#10

62% similar

"Secara non litigasi sebenarnya sudah ada regulasinya melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar persidangan, juga ada Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)"

<https://media.neliti.com/media/publications/282137-tanggung-jawab-badan-arbitrase-syariah-n-5bd3b84d.pdf>

...n perundang undangan yang selaras dan saling berkesinambungan terkait permohonan eksekusi putusan **BASYARNAS. Untuk itu, menurut penulis ada baiknya Pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan menambahkan ketentuan mengenai Arbitrase Syariah secara khusus.** Demikian pula Undang-Undang lain yang erat kaitannya dengan arbitrase Syariah, agar terwujudnya h...

#11

57% similar

"Sebagaimana pembahasan sebelumnya perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dalam pasal tersebut menjekaskan perbuatan melawan hukum yaitu yang membawa kerugian kepada orang lain, dan mewajibkan orang yang berbuat tersebut karena lalainya mengganti kerugian""

<http://lbhamin.org/perbuatan-melawan-hukum>

...yang lain, orang yang mengalami kerugian tersebut dijamin haknya oleh Undang-Undang untuk menuntut **ganti rugi**. **Marium Darus Badruzaman, mengatakan: "Pasal 1365 KUHPerdata menentukan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian ini mengganti kerugian** tersebut". Selanjutnya dikatakan bahwa: "Pasal 1365 KUHPerdata ini sangat penting artinya karena mel...

#12

98% similar

"Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya; b"

<https://media.neliti.com/media/publications/90450-ID-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah-di.pdf>

...ihan. Adapun sengketa di bidangekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah:15a. **Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangandan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya**; 14 Suhartono, Prospek Legislasi Fikih Muamalah Dalam Sistem Hukum Nasional,www.Badilag.net tanggal 3...

#13

95% similar

"Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan

dan lembaga pembiayaan syariah, dan c"

<https://media.neliti.com/media/publications/90450-ID-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah-di.pdf>

...2 di Banten, 2011, hlm.8 Erie Hariyanto al-lhk?m, V o l . 1 N o . 1 J u n i 2 0 1 452 Iqtishadia b. **Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah;c.** Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiann...

#14

73% similar

"Hal ini perlu ditegaskan karena ketentuan Pasal 49 UU No 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam...."

[https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang\\_Republik\\_Indonesia\\_Nomor\\_3\\_Tahun\\_2006](https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_3_Tahun_2006)

..."Saya bersumpah bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara". **37. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 49 Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah;...**

#15

80% similar

"Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Sengketa Ekonomi Syariah 1"

[https://www.academia.edu/31953006/KEWENANGAN\\_PERADILAN\\_AGAMA\\_DI](https://www.academia.edu/31953006/KEWENANGAN_PERADILAN_AGAMA_DI)

...persTermsPrivacyCopyright We're Hiring! Help Centerless

pdf**KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DI DALAM PERKARA EKONOMI SYARIAH**Jurnal MahkamahAsep SaepullahJurnal MahkamahAsep SaepullahDo...

#16

69% similar

"Dalam peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tersebut dijelaskan tentang tujuan mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan"

<https://media.neliti.com/media/publications/276889-mediati-sebagai-alternatif-dalam-penguru-c135c5ce.pdf>

...un suatu konsep yang menjadi acuan dalam penelitian tersebut. ANALISIS DAN PEMBAHASAN Teori Mediasi **Dalam Collins English Dictionary and Thesaurus disebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan** 9 Prosiding, Kewajiban dan Standar Pelaporan Dalam Kepailitan & Perlindungan Kurator dan Harta Paili...

#17

91% similar

"dalam mediasi penyelesaian perselisihan atau sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan membantu mereka mencapai kesepakatan-kesepakatan"

[http://eprints.walisongo.ac.id/3115/3/2105196\\_Bab%202.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/3115/3/2105196_Bab%202.pdf)

...kewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak.<sup>7</sup> **Dalam mediasi, penyelesaian perselisihan atau sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan**

inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan membantu mereka mencapai kesepakatan. Dalam membantu pihak yang bersengketa, mediator bersifat imparisial atau tidak memihak. Kedudukan mediator seperti ini sangat...

#18

64% similar

"Konstitutif, yaitu putusan yang menghapus suatu keadaan hukum atau menetapkan suatu keadaan hukum baru yang berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya"

[https://media.neliti.com/media/publications/238230-problematika-hukum-  
implementasi-putusan-043aef6f.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/238230-problematika-hukum-implementasi-putusan-043aef6f.pdf)

...san yang menyatakan apa yang menjadi hukum, atau menegaskan suatu keadaan hukum. Sedangkan putusan **constitutief berarti bahwa putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum, atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru.**<sup>37</sup> Berdasarkan kerangka tersebut, putusan MK dapat dikualifikasikan ke dalam putusan declaratoir dan constitutief. Pasal 56 ayat (3) Undang-U...

#19

59% similar

"Putusan Verstek, yaitu putusan dalam hal Tergugat tidak hadir baik sidanf pertama maupun sesudahnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. c"

[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58c7641ea963c/dapatkah-  
tergugat-mengajukan-verzet-saat-penggugat-mengajukan-banding](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58c7641ea963c/dapatkah-tergugat-mengajukan-verzet-saat-penggugat-mengajukan-banding)

...mencermati pertanyaan Anda, kami berasumsi bahwa maksud pertanyaan Anda adalah dalam konteks adanya **putusan perstek (verstek), yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa adanya kehadiran Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.** Selanjutnya, dari informasi yang

Anda berikan, Penggugat melakukan upaya hukum banding karena gugata...

Plagiarism detection provided by [Quetext](#)